
**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (ILPPD) TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Pemerintah (vertikal) dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD (horizontal) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Menyangkut masalah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, baik yang dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun Pengelolaan Belanja Daerah, pada tahun anggaran 2018 dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan pendapatan daerah selama tahun 2018 sebesar Rp.1.150.095.991.325,17 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Belas Sen*) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.123.643.571.511,26 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) atau 102,35% (Sumber : Laporan Keuangan Pemkab HSU yang belum diaudit oleh BPK).

Sedangkan untuk pengelolaan belanja daerah dapat kami jelaskan bahwa APBD telah disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan yang mendesak dan bersifat strategis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pada pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dengan tertib, taat pada aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Program-program dan kegiatan pada pengeluaran / belanja daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya.

Selama Tahun Anggaran 2018 jumlah realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.147.074.946.516,50 (*Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Lima Puluh Sen*) dari jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.1.291.748.943.846,- (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang dengan kata lain kita telah berhasil melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2018 ini sebesar Rp.144.673.997.329,50 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen*) (Sumber : Laporan Keuangan Pemkab HSU yang belum diaudit oleh BPK).

Untuk Urusan Wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan. Pelaksanaan urusan tersebut telah disusun dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana dalam pelaksanaan urusan tersebut telah terjalin komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sehingga semua program tersebut dapat berjalan dengan baik.

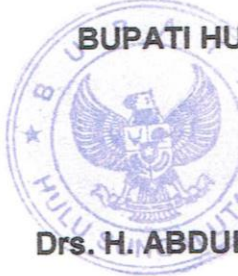

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2018 meliputi antara lain Kerjasama Antar Daerah dan Dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal yang ada di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan koordinasi tersebut kita rasakan cukup harmonis dan berjalan dengan sangat baik.

Menyangkut masalah batas wilayah, kita telah merampungkan beberapa batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten lainnya dan sedang dalam tahap menyelesaikan batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan penataan batas ini masih akan kita lanjutkan dengan kegiatan pemeliharaan batas serta pelacakan batas daerah dengan Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih belum di sepakati dengan di fasilitasi tim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan.

Beberapa keberhasilan dan penghargaan telah kita raih selama tahun 2018 diantaranya :

- 1) Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan sisten JDIHN;
- 2) Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2018 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- 3) Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 4) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- 5) Penghargaan Pastika Parahita dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten yang mempunyai Perda dan Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 6) Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia;
- 7) Penghargaan Adipura atas Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten/Kota periode 2017-2018;
- 8) Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat Nilai B dari Menpan RB (Sumber : Bagian Humas dan Protokol Setda HSU).

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Drs. H. ABDUL WAHID HK, MM, M.SI